

EVALUASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI PADA SATPOL PP UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Mishul Sauliyah Fitriawati¹, Dwi Orbaningsih², Sungkono³

¹²³Universitas Gajayana Malang

Mishul123@gmail.com, dwi123@gmail.com, sungkono123@gmail.com

ABSTRACT

The Civil Service Police Unit (Satpol PP) is one of the government officials who is a line element that is always at the forefront of maintaining the mandate of Regional Regulations and is always in direct contact with the community. Order and peace in society are things that are highly coveted, both by state administrators, in this case the government, as well as the community itself and for the creation of order and peace, this certainly cannot be separated from the role of Satpol PP in collaboration with other law enforcement agencies. Therefore, the affairs of order and peace are also left to the Satpol PP in order to maximize the socialization of legal products, especially Regional Regulations, Probolinggo Regency Government Regulations, Probolinggo Regency Government Decrees and other legal products in carrying out the wheels of Government in the region to the community.

This research uses a qualitative approach that produces descriptive data, this type of research is descriptive research. The place of this research was in the Head of Security and Escort in the Civil Service Police Unit, Probolinggo Regency. In this study, the researcher used a qualitative research method which was designed in three stages, namely interviews, observation and documentation. In conducting this research, the required data were obtained from two sources, namely: primary data and secondary data.

The results of this study concluded that to carry out the duties of both daily activities and administrative tasks, the Probolinggo District Civil Service Police Unit in addition to functional positions also formed sub-sections that were responsible for their duties and functions, especially in the field of administration. each individual member of the organization is provided with good training to support their performance. Employees who are proven to have decreased performance are to provide clear feedback and find out the cause of the decline in performance. As a boss always get used to appreciate every improvement.

Keywords: *Administration, Satpol PP, Descriptive, Qualitative Method.*

INTRODUCTION

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat akan menunjang terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan terwujudnya tujuan Negara yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja jelas akan membawa pemerintah dan masyarakatnya akan lebih leluasa melakukan aktifitasnya secara aman, tentram, tertib dan teratur yang selanjutnya akan mendukung tercapainya stabilitas nasional. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 menyebutkan: "Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.

Otonomi daerah merupakan pokok perbincangan yang serius sejak awal kemerdekaan hingga tumbangannya Pemerintahan Orde Baru dan beralih menuju era reformasi. Sejak awal kemerdekaan hingga sekarang telah terjadi perubahan berbagai model otonomi yang telah diterapkan di Indonesia. Otonomi daerah menurut Piliang (dalam Chalid, 2015: 15) adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan model otonomi daerah tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur otonomi daerah adalah UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan lahirnya undang-undang tersebut segala hal mengenai otonomi daerah diatur di dalamnya, termasuk penambahan atau pengurangan lembaga pemerintah/ institusi pemerintah di daerah, model pengawasan, pertanggungjawaban, kewenangan pusat dan

daerah, keuangan dan lain sebagainya.

Pelaksanaan otonomi daerah telah melahirkan keleluasaan yang cukup luas dan kuat bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerah yang menjadi kewenangannya. Berbagai peraturan daerah (perda), peraturan bupati dan serangkaian peraturan lain guna mendukung mekanisme pelaksanaan otonomi daerah mulai dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Lahirnya berbagai perda tersebut ternyata perlu penegakkan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, guna mencapai tujuan yang diamanatkan maka dibutuhkan satuan organisasi khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan Perda, dan pelanggaran yang terjadi. Institusi yang bertugas dan berwenang mengawal pelaksanaan, penegakkan perda saat ini lebih dikenal dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disingkat Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, khususnya pada sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo memerlukan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada setiap tahunnya. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2021.

Berdasarkan uraian diatas, hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi satpol PP terdapat salah satu permasalahan yang menempati permasalahan pertama yaitu pengelolaan administrasi tidak maksimal sehingga mempengaruhi kemampuan SDM, inisiatif, sarana prasarana, dan anggaran. Terciptanya juga permasalahan pelayanan dalam pengelolaan administrasi tidak tertata dengan baik. Oleh karena itu peneliti memfokuskan untuk melakukan evaluasi pengelolaan administrasi pada Satpol PP untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

RESEARCH METHODS

Lokasi penelitian dengan observasi di Kasi Pengamanan dan Pengawalan pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif.

Rancangan Penelitian. Menentukan informan penelitian sesuai dengan teknik yang sudah ditentukan yaitu melalui keterangan orang yang berwenang dipemerintahan dan melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti memilih informan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Probolinggo, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pengembangan Kapasitas, Kepala Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban umum, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perwakilan Masyarakat.

Sumber data primer diperoleh dari lapangan dimana penelitian itu dilaksanakan dengan metode wawancara. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti menganalisis data yang sudah diperoleh dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dengan catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lain-lain. Mengecek keabsahan data yang merupakan konsep validitas dan reabilitas data.

RESULT AND ANALYSIS

Pengelolaan Administrasi pada Satpol PP untuk Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Di Kabupaten Probolinggo

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan hasil penelitian baik hasil wawancara maupun hasil observasi yang dihasilkan dari hasil wawancara atau observasi bersama pimpinan atau staf Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo. Sebagaimana

hasil wawancara dengan Bapak Achmad Aruman, S.Sos.MM sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo:

“Terimakasih atas kepercayaannya mengadakan penelitian di kantor kami Satpol PP Kabupaten Probolinggo ini, dalam melaksanakan tugas pelayanan umum Kami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat maka kami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebagai Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yang tugasnya dijelaskan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo , dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 2. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur; 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman.” (Sumber: wawancara hari jum’ at tanggal 18 Maret 2022).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran dan keberadaan satuan polisi pamong praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dimana peran dan aktivitas yang harusnya dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang menjunjung norma hukum, hak asasi manusia, dan normanorma kemasyarakatan lainnya.

Maju dan berkembangnya sebuah organisasi tidak lepas dari peran sertanya pengelola administrasi. Berkenaan dengan administrasi peneliti terlebih dahulu mewawancarai kepala sub bagian umum dan kepegawaian yang dalam hal ini dipimpin oleh bapak Sudar, SP., MMA dalam wawancaranya:

“Terimakasih atas kepercayaannya mewawancarai kami, dalam pelaksanaan sebuah tidak bias lepas dari yang namanya administrasi, , administrasi ini yang akan menentukan baik tidaknya sebuah organisasi. Sebelum melangkah Susunan Organisasi terlebih dahulu saya koordinasi dengan bapak kepala seperti apa struktur organisasinya, baru kami membuat tugas dan pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata. .” (Sumber: wawancara hari jum’ at tanggal 18 Maret 2022).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi bagian dari struktur organisasi yang memiliki hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. peneliti juga mengadakan wawancara dengan bapak Beni Trisna Wijaya, S.Kom kasub bagian keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo tentang administrasi yang berkaitan dengan tugas bagian keuangan dalam wawancaranya:

“Saya sebagai pegawai bagian keuangan administrasi yang saya lakukan adalah menyusun program dan rencana kerja di sub bagian program berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sub bagian program dan keuangan, yang lain penting dalam keuangan adalah mampu menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana tahunan (Renja), Perjanjian Kinerja (Tapkin) dan Budaya Kerja Satuan serta menyusun Laporan Perkembangan Kinerja Program dan Kegiatan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan , dan masih banyak lagi hal-hal yang berlu kami lakukan berkaitan dengan administrasi keuangan. (Sumber: wawancara hari jum’ at tanggal 25 Maret 2022).

Dari wawancara dengan bagian keuangan di atas, setelah peneliti mengadakan talaah pada tugas dan pokok bagian keuangan di satuan kepegawaian Satpol PP Kabupaten Probolinggo, selain yang disampaikan di atas ada beberapa hal yang administrasi yang menjadi tanggung jawab bagian keuangan, yang diantaranya:

1. Menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing- masing bidang.
2. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM).
3. Menyiapkan usulan pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan.
5. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan.
6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan keuangan berdasarkan program kerja.
7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

Kendala dalam Pengelolaan Administrasi pada Satpol PP untuk Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat di Kabupaten Probolinggo

Aparat satuan polisi pamong praja perlu memiliki kemampuan dan keahlian tertentu. Kemampuan dan keahlian tersebut hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang memiliki jenjang dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal, semakin memungkinkan setiap aparat Satuan Polisi Pamong Praja memahami tugas-tugas yang diembannya. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang diperoleh di luar jalur formal seperti pelatihan, penataran dan pemagangan. Semakin banyak frekuensi pelatihan, penataran, dan pemagangan yang diikuti oleh setiap aparat Satuan Polisi Pamong Praja, semakin profesional dan ahli dalam bidangnya. Demikian halnya yang

dialami oleh aparat di Kantor satpol PP Kabupaten Probolinggo kepala satuan Satpol PP Kabupaten Probolinggo menyampaikan dalam wawancaranya:

“Terimakasih, kendala yang selama ini saya alami adalah sumber daya manusia yang ada anggota kami, dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa satpol PP dalam melaksanakan tugas masih banyak mengalami kendala, dimana kendala tersebut adalah karena minimnya kemampuan yang dimiliki oleh aparat yang ada di Kantor Satpol PP Kabupaten Probolinggo . Rata-rata aparat Satpol PP memiliki tingkat pendidikan SLTA dan bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan SMP, SD dan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya. Inisiatif kerja yang dimiliki oleh aparat satpol PP juga masih rendah, hal ini dapat dilihat dari setiap pekerjaan yang dilakukan, selalu harus menunggu perintah atasan, tidak ada inisiatif dari aparat itu sendiri untuk menyelesaikan tugas yang dilaksanakan. Hal inilah yang menjadi kendala bagi aparat satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. (Sumber: wawancara hari senin tanggal 4 April 2022).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisis sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin merambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga, sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Selain kendala di atas Bapak Bambang Heriwahjudi, S.Sos M.Si sebagai Sekretaris Satpol PP Kab. Probolinggo juga menyampaikan dalam wawancaranya yang dapat ditarik kesimpulan bahwa Sarana dan prasarana memiliki arti sebagai seperangkat alat yang bisa digunakan untuk melangsungkan suatu kegiatan. Selain melangsungkan kegiatan sarana juga untuk kelancaran kegiatan ini dapat mempermudah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan sarana yang lengkap pegawai bisa meraih hasil yang paling baik karena adanya dukungan dari berbagai alat utama dan

alat pendukung tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala subbagian umum dan kepegawaian bapak Sudar, SP., MMA menunjukkan bahwa kendala atau Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Probolinggo yang dilihat dari faktor inisiatif kerja belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas. Hal ini terjadi karena aparat Kabupaten selalu hanya menunggu perintah, dan kurang memiliki inisiatif sendiri dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas organisasi belum maksimal dilaksanakan. Salah satu kendala yang terjadi disaat dinas mau menjalankan program terhambat dengan yang namanya anggaran, hal ini seperti wawancara yang disampaikan oleh kepala sub bidang rencana dan keuangan, bapak Beni Trisna Wijaya, S.Kom dalam wawancaranya:

“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada diri kami. Salah satu kendala yang kami rasakan selama ini berupa ketersediaan dana operasional yang dimiliki oleh Satpol PP digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Anggaran merupakan ujung tombak organisasi dalam menjalankan suatu organisasi, tanpa ada pengelolaan anggaran, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pembiayaan dan sebagainya organisasi tidak akan berjalan dengan baik. (Sumber: wawancara hari senin tanggal 6 April 2022).

Dari wawancara di atas bias dijadikan benang merah bahwa anggaran merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan sebuah organisasi. Berhasil tidaknya sebuah organisasi sangat tergantung dari ketersediaan anggaran yang dapat digunakan secara efisien untuk membiayai kegiatan organisasi.

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dalam menyelesaikan masalah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh Bapak Sudar, SP., MMA, Kasubag umum dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

“Anggota satuan Polisi Pamong Praja ada yang sudah hampir pensiun, rata-rata pendidikannya paling tinggi SMP hal ini menjadi kendala pada kami untuk menjalankan

program. Maka Upaya saya lakukan untuk mereka, jika pendidikan yang rendah disini merujuk kepada pendidikan secara formal maka akan bergantung kepada konteksnya. Jika untuk kebutuhan mendapatkan sebuah pekerjaan maka saya sarankan untuk mengikuti kursus tertentu sesuai dengan minat dan kesanggupan untuk belajar. Bisa mengikuti kursus di BLK atau kursus yang disediakan lembaga lain untuk memiliki keahlian tertentu. Jika bukan untuk kebutuhan mendapatkan kenaikan pangkat maka bisa mengikuti kejar paket. Banyak media yang bisa mendukung untuk pembelajaran dan belajar, yang paling umum adalah menggunakan “google“ untuk membaca banyak artikel, menggali informasi, dan mengikuti topik yang diminati. Karena pendidikan tidak didefinisikan secara sempit dengan hanya mengikuti pendidikan formal saja, melainkan etika, moral, keluasan wawasan, kedalaman pemahaman, dan penguasaan keahlian pun juga merupakan bagian dari proses pendidikan itu sendiri. (Sumber: wawancara hari Kamis tanggal 7 April 2022).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pekerja atau karyawan di instansi terkait perlu dilatih atau diikutkan training. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan keterampilan, kemampuan, serta sikap yang dimiliki. Perusahaan akan tidak mudah untuk berkembang ketika karyawannya tidak memiliki minat atau tidak mempunyai keterampilan secara khusus. Salah satu kendala dalam pengelolaan administrasi pada Satpol PP untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat di Kabupaten Probolinggo sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh kepala sub bagian umum dan kepegawaian bapak Sudar, SP., MMA di bawah ini:

“Terimakasih kepercayaannya pada saya diberi waktu untuk menyampaikan kendala kami selaku bagian kepegawaian di Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Ketika kita menjadi pemimpin di suatu instansi atau departemen pasti kita pernah menghadapi karyawan yang menurun kualitas kinerjanya, tidak memiliki motivasi, sering melakukan kesalahan, dan berbagai masalah lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja tim. Hal ini dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian tim atau instansi. Kita sebagai pemimpin harus mengetahui masalah yang

terjadi di dalam diri karyawan kita. Maka solusi yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi karyawan terbukti memiliki penurunan kinerja adalah (1) Berikan feedback yang jelas. Kalau cara yang biasa saya lakukan adalah (2) Tunjukkan perhatian perusahaan (3) Cari tahu mengapa menurun kinerjanya (4) menciptakan tujuan performa bersama (5) Akui dan hargai setiap perbaikan (6) Lakukan langkah formal selanjutnya ini salah satu upaya yang biasa saya lakukan pada teman-teman rekan kerja saya” (Sumber: wawancara hari senin tanggal 19 April 2022).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 menyusun Rencana Kerja serta Rencana Strategis yang ditugaskan dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu bentuk upaya Pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan sebagaimana wawancara dengan kepala bagian keuangan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi ekonomi yang masih melambat, pemerintah daerah wajib menyesuaikan diri dengan merealokasi anggaran pada pos belanja prioritas. Bisa dipahami langkah pemerintah tersebut, demi menyelamatkan APBD dari ancaman defisit yang besar. Namun, memang harus dipastikan, pemangkasan tidak membuat pembangunan menjadi stagnan. Justru disaat ini, pemerintah daerah harus mampu memfokuskan belanja pada kegiatan atau program yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, yang antara lain adalah pada pelayanan dasar dan pelayanan non dasar.

REFERENCES

- Mujib (2015). “Tingkat kepuasan kerja petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota cilegon.” Jurnal Niagara.2018
- Ridwan (2019).” Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)”.Jurnal Ilmiah Magister.2020
- Asmaul Husna (2018).” Gaya kepemimpinan kepala satuan polisi pamong praja pemerintah kota makassar”.Universitas Muhamadiyah makasar.2018
- Sulistyo Ardhi Wibowo (2018). “Implementasi Tugas Dan Wewenang Satpol Pp Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi.” Bantul.2018

Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah

Volume 3, No.2, Desember 2022, ISSN (Online): 2774-5570

DOI :

- Prasetyo (2011). "Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja ." thesis, Universitas Brawijaya.2011
- Rahman, M. A., & Maysaroh, S. (2020). Effect Of Work Life Policy, Work Involvement And Conflict Of Working Family To Turnover Intentions On Employees. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 1(2), 213-233.
- Rahman, M. A. (2021). Pengaruh Suasana Hati dan Kompetensi terhadap Kinerja Usaha melalui Kewirausahaan terhadap UMKM di Desa Tanjung Bumi Kab. Bangkalan. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 74-90.
- Panji Anggoro (2019). "Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kabupaten Jember (Studi Pada Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Jember)." Unmuh Jember.2019
- Moleong, (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif : Bandung: PT RemajaRosda karya Offset
- Muhlisin, M., & Rahman, M. (2021). The influence of marketing abilities, innovation abilities and learning abilities on the performance of UKM in The Region Diy Province. *Technium Soc. Sci. J.*, 16, 234.
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2018 ttg Satuan Polisi Pamong Praja Soerjono Soekanto, dalam Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Jakarta 2009
- E.Efendi (2022). "Peran Satuan Polisi Pramong Praja dalam Penertiban Disiplin Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Masyarakat Kabupaten Pati."Institute Pemerintahan Dalam Negeri. 2022.
- PN Sari (2021)."Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pemasangan Spanduk Reklame Dan Baliho Di Kota Pekanbaru."Universitas Islam Riau. 2021
- Cucu Ardian (2021)." Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut." Jurnal Publik Vol.15No.1.2021
- Suhendi (2021)."Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menjaga Wibawa pemerintah dengan menegakkan Peraturan Daerah." Jurnal Tatapamong. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2021